

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Maret
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78.828.746.232	21,16	21,15	0,01	14.798.372.102	18,77	7.851.242.325	9,96	8,81						
1.1	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.638.500	47,45	45,80	1,65	3.548.000	46,45	3.494.000	45,74	0,71						
1.1.1	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.620.000	70,61	64,00	6,61	1.850.000	70,61	1.850.000	70,61	0,00						<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Forum OPD Rencana Kerja BPKA telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara oleh pemangku kepentingan terkait Rancangan Awal Renja Tahun 2026 telah disusun Terselesaikannya dokumen Perjanjian Kinerja 2025 Tersedianya ROPK Fisik 2025 Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2022-2027 telah terusun <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Waktu yang diberikan untuk melakukan penyesuaian usulan anggaran cukup terbatas, sehingga terkadang menjadikan usulan yang baru kurang optimal Deviasi keuangan sebesar Rp 1.360.000,- berasal dari efisiensi honor Narum sebesar Rp 1.000.000,- dan makan minum rapat sebesar Rp 360.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komunikasi yang terjalin baik antara TAPD dengan OPD sehingga dinamika penyusunan dokumen perencanaan dapat direspon dengan cepat Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 SDM yang kompeten Sarana dan Prasarana yang memadai
1.1.2	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.450.500	24,25	24,25	0,00	830.000	24,05	830.000	24,05	0,00						<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 2 dokumen Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD berupa Dokumen DPA SKPD Tahun 2026 : 0 dokumen dari 1 dokumen Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD berupa Dokumen Perubahan DPA SKPD Tahun 2025 : 0 dokumen dari 1 dokumen <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 tanggal 17 Maret 2025</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Aplikasi SIPD Penatausahaan yang sering terdapat kendala akses</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 4. DPPA Nomor : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 tanggal 17 Maret 2025 6. SDM yang kompeten 7. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.1.3	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.568.000	59,80	62,80	-3,00	868.000	55,36	814.000	51,91	3,45						<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunya laporan evaluasi kinerja bulan Februari 2. Tersusunya dokumen LKJIP <p>Faktor Penghambat: Realisasi sudah sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 54.000,- ,pada Belanja bahan komputer di merupakan selisih harga pada Mbiz market</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar unit kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan capaian kinerja sesuai target 2. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 3. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thaua 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 4. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 5. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 6. SDM yang kompeten 7. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.2	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.159.861.482	20,80	20,80	0,00	13.989.149.302	18,37	7.201.129.624	9,46	8,91						
1.2.1	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.132.541.982	20,80	20,80	0,00	13.981.075.352	18,36	7.194.533.524	9,45	8,91						<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 240 orang dari 240 orang <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya peremajaan data gaji pegawai 2. Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ASN BPKA DIY 3. Tersusunya laporan gaji dan tunjangan <p>Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai target bulan Maret, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 5.907.694.950,- karena menyesuaikan kondisi data pegawai yang ada, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Gai Pokok PNS Rp. 1.466.165.599,- 2. Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp. 615.548.848,- 3. Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. 483.693.804,- 4. Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp. 69.310.000,- 5. Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp. 39.420.000,- 6. Belanja Tunangan Fungsional Umum PNS Rp. 288.595.000,- 7. Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 450.235.140,- 8. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan khusus PNS Rp. 4.256.995,- 9. Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 144.724,- 10. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 222.523.292,- 11. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp. 50.433.446,- 12. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 7.829.491,- 13. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp. 1.295.277,- 14. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 23.488.296,- 15. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																6.863.197,- 16. Belanja simpanan Taperum Rp. 1.724.359.627,- 17. Belanja TPP PNS Rp. 413.921.693,- 18. Belanja TPP PPPK Rp. 62.583.510,- Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thau 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.2.2	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.320.000	26,80	27,30	-0,50	5.160.000	26,71	5.160.000	26,71	0,00					Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek kegiatan 2. Tersedia nya rekapitulasi penerimaan per rincian obyek penerimaan 3. Terlaksananya entry data maker cekker CMS belanja kegiatan 4. Tersusunya pertanggungjawaban SPJ pengeluaran bulan Februari Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target yang sudah di tetapkan Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thau 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.2.3	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	52,00	52,00	0,00	2.498.850	49,98	1.021.000	20,42	29,56					Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terselesaikannya laporan keuangan Un Audited Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target pada bulan Februari, terdapat deviasi keuang sebesar Rp, 1.477.850,- akan di SPJ kan pada bulan berikutnya Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thau 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.2.4	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.999.700	17,50	20,50	-3,00	415.100	13,84	415.100	13,84	0,00					Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedia nya laporan keuangan per bulan sebagai bahan prognosis Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thau 2023 tentang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.3	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.100.000	25,50	26,00	-0,50	8.660.000	25,40	8.400.000	24,63	0,77					
1.3.1	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.100.000	25,50	26,00	-0,50	8.660.000	25,40	8.400.000	24,63	0,77				1. umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 3 laporan dari 12 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedia nya data inventarisasi barang persediaan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 260.000,- pada belanja kertas dan cover dalam proses SPJ Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thauun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.4	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.483.000	80,00	80,00	0,00	4.355.000	79,43	3.279.000	59,80	19,63					
1.4.1	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.483.000	80,00	80,00	0,00	4.355.000	79,43	3.279.000	59,80	19,63				1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 3 dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya dokumen monev Tersusunnya dokumen Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya koordinasi penyusunan SOP internal bidang Faktor Penghambat: Adanya kekeliruan dalam melakukan penilaian pegawai yang memerlukan perbaikan dan koordinasi dengan BKD Deviasi keuangan sebesar Rp. 1.076.000,- terdiri dari : 1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 336.000,- merupakan sisa angkas s.d. bulan Maret 2. Belanja kertas dan cover sebesar Rp. 65.000,- merupakan sisa angkas s.d. bulan Maret 3. Belanja makan minum rapat sebesar Rp. 675.000,- di karenakan ada beberapa koordinasi/ rapat dengan daring Faktor Pendukung: 1. Penilaian kinerja pegawai terselesaikan secara tepat waktu 2. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 3. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 4. SDM yang kompeten 5. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.5	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.128.050	38,92	38,92	0,00	188.916.400	37,70	91.404.360	18,24	19,46					
1.5.1	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	9.558.600	26,60	26,60	0,00	2.399.000	25,10	2.353.800	24,62	0,48				1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya komponen instalasi listrik berupa Baterai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														yang Disediakan : 1 paket dari 1 paket	Tersedianya komponen instalasi listrik berupa Lampu LED Faktor Penghambat: Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 45.200,- merupakan sisa angkas bulan Februari Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thaun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.5.2	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.473.600	22,93	22,93	0,00	26.210.400	20,40	24.343.300	18,95	1,45					1. Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 paket dari 4 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kertas dan cover Tersedianya kebutuhan bahan komputer Faktor Penghambat: Pengadaan bisa kurang maksimal apabila ada ATK, Kertas dan Cover, dan Bahan Komputer yang dibutuhkan namun tidak teranggarkan Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.867.100,- merupakan sisa angkas sampai dengan bulan Maret, terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp. 514.600,- 2. Belanja kertas dan cover Rp. 49.500,- 3. Belanja bahan komputer Rp. 1.303.000,- Faktor Pendukung: Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thaun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
1.5.3	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.769.000	29,33	29,33	0,00	3.281.000	23,83	3.138.000	22,79	1,04				1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang Disediakan : 1 paket dari 1 paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan kebutuhan peralatan rumah tangga berupa bahan kebersihan kamar mandi Tersedianya bahan kebutuhan peralatan rumah tangga berupa bahan kebersihan kendaraan dinas</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 143.000,- merupakan sisa angkas sampai dengan bulan Maret</p> <p>Faktor Pendukung: Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thaun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai</p>
1.5.4	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.364.850	20,20	20,20	0,00	6.457.000	18,79	5.913.300	17,21	1,58				1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 paket dari 3 paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya barang kebutuhan cetak berupa blangko Bend 26 Tersedianya barang kebutuhan cetak berupa stopmap berkop</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 543.700,- pada belanja bahan cetak di karenakan menyesuaikan kebutuhan</p> <p>Faktor Pendukung: Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thaun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai</p>
1.5.5	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.356.000	25,14	25,14	0,00	2.589.000	25,00	2.340.000	22,60	2,40				1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 3 dokumen dari 3 dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan bacaan (Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, Tempo, Kompas)</p> <p>Faktor Penghambat: Majalah/surat kabar dapat berhenti produksi di tengah tahun anggaran Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 249.000,- merupakan sisa angkas sampai dengan bulan Maret</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thaun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
1.5.6	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.860.000	50,70	50,70	0,00	102.475.000	50,27	18.746.560	9,20	41,07				1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 laporan dari 12 laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya bahan jamuan rapat internal 2. Terpenuhinya jamuan kunjungn tamu luar daerah 3. Terpenuhinya biaya perjalanan/koordinasi luar daerah 4. Terpenuhinya belanja ekstra fooding s.d. bulan Maret bagi petugas arsip <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 83.728.440,- terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja makan minum rapat sebesar Rp. 10.094.500,- karena anggaran bersifat persediaan 2. Belanja perjalanna dinas luar daerah Rp. 73.633.940 karena Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila ada undangan dari instansi pusat, atau apabila ada ketugasan urgent <p>Faktor Pendukung: Membantu penyelenggaraan rapat di bidang-bidang</p>
1.5.7	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.746.000	45,78	45,78	0,00	45.505.000	45,17	34.569.400	34,31	10,86				1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 2 dokumen dari 12000 dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SK Kaban tentang Panitia Penilain Penyusutan Arsip Tahun 2025 2. Tersedianya bahan penambah daya tahan tubuh/ekstra fooding bagi petugas arsip s.d. bulan Maret 3. Terpenuhinya pembasmi hama tikus s.d. bulan Maret 4. Terlaksananya Fumigasi ruang arsip <p>Faktor Penghambat: Arsip Inaktif terus bertambah namun pengelolaannya sumber daya terbatas Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 10.935.600,- terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja ATK Rp. 3.000.000,- dikarenakan menyesuaikan kebutuhan, akan di SPJ kan pada bulan berikutnya 2. Belanja kertas dan cover sebesar Rp. 250.000,- 3. Belanja bahan komputer Rp. 70.000,- 4. Belanja fumigasi sebesar Rp, 7.615.000,- di karenakan adanya selisih harga antara SHBJ dengan harga pasar pada belanja fumigasi, <p>Faktor Pendukung: Adanya pendampingan dari DPAD</p>
1.6	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148.690.000	100,00	100,00	0,00	148.690.000	100,00	145.246.300	97,68	2,32					
1.6.1	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.690.000	100,00	100,00	0,00	148.690.000	100,00	145.246.300	97,68	2,32				1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya : 6 unit dari 6 unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan peralatan dan mesin telah selesai dilaksanakan</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi Sesuai angkas terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.443.700,-</p> <p>Faktor Pendukung: Penyedia dapat menyediakan barang TKDN</p>
1.7	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.596.278.000	24,19	24,19	0,00	368.941.000	23,11	324.040.781	20,30	2,81					
1.7.1	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.250.000	19,84	19,84	0,00	3.050.000	18,77	2.624.600	16,15	2,62				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 laporan dari 1 laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya benda pos / materi Terekirimkannya surat surat dinas/jasa pengiriman</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 425.400,- adalah sisa angkas sampai dengan bulan Maret</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thau 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.7.2	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	918.880.000	25,01	25,01	0,00	229.694.000	25,00	194.058.071	21,12	3,88					<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbayarkannya belanja tagihan Telepon s.d bulan Maret 2. Terbayarkannya belanja tagihan Air s.d. bulan Maret 3. Terbayarkannya belanja tagihan listrik s.d. bulan Maret 4. Terbayarkannya belanja tagihan zoom meeting s.d. bulan Maret 5. Terbayarkannya belanja internet/VPN TW 1 <p>Faktor Penghambat: Dikarenakan anggaran merupakan persediaan sehingga realisasi menyesuaikan kebutuhan, deviasi keuangan sebesar Rp. 35.635.929,- terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tagihan Telepon Rp. 1.372.623,- 2. Belanja tagihan Air Rp. 1.230.900,- 3. Belanja tagihan Listrik Rp. 32.800.117,- 4. Belanja tagihan fax/Zoom Rp. 232.289,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thau 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.7.3	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.760.000	19,20	19,20	0,00	15.390.000	18,60	7.852.110	9,49	9,11					<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya sewa peralatan foto copy s.d. bulan Maret 2. Terpenuhinya sewa pngharum ruangan TW 1 <p>Faktor Penghambat: Realisasi fisk sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 7.537.890,- terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja jasa kebersihan sebesar Rp. 1.500,- 2. Belanja sewa mesin F.copy sebesar Rp. 1.776.390,- di karenakan sesuai pemakaian 3. Belanja sewa tanaman sebesar Rp. 5.760.000,- dikarenakan SPJ sedang dalam proses terkendala penghitungan pajak baru (coretax) <p>Faktor Pendukung: Dilaksanakan sesuai anggaran kas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thau 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
1.7.4	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	578.388.000	23,73	23,73	0,00	120.807.000	20,89	119.506.000	20,66	0,23				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 laporan dari 12 laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terpeliharanya kebersihan kantor s.d. Tw 1 Terpenuhinya jasa keamanan kantor s.d. TW 1</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target pada Triwulan I,, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.301.000,- terdiri dari : 1. Belanja jasa kebersihan Rp. 251.000,- 2. Belanja jasa keamanan Rp. 1.050.000,-</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thaun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai</p>
1.8	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.567.200	23,64	21,69	1,95	86.112.400	22,93	74.248.260	19,77	3,16					
1.8.1	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.726.000	13,30	13,30	0,00	2.400.000	12,82	800.000	4,27	8,55				1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 0 unit dari 1 unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas jabatan</p> <p>Faktor Penghambat: Realiasi keuangan menyesuaikan kebutuhan sehingga terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.600.000,- pada Belanja bahan bakar</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thaun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai</p>
1.8.2	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.007.200	23,49	21,82	1,67	50.151.400	22,69	44.898.780	20,32	2,37				1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 5 unit dari 17 unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional 2. Tereleasaikannya belanja perizinan/pajak kendaraan dinas roda 4 (AB 1056) 3. Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 (AB 6954,) dan (AB 2670)</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan target bulan Maret, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.102.620 ,- terdiri dari : 1. Belanja BBM dan pelumas sebesar Rp. 59.500,- 2. Belanja suku cadang sebesar Rp. 278.120,- 3. Belanja perizinan/pajak kendaraan Rp. 764.400,-</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Thaun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.8.3	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.834.000	24,35	17,80	6,55	13.561.000	24,29	8.716.000	15,61	8,68				1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 7 unit dari 85 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor berupa pemeliharaan AC central 1 unit dan AC split 4 unit Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor berupa printer Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.071.000,- merupakan sisa angka sampai dengan bulan maret 2025 Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
1.8.4	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	26,00	26,00	0,00	20.000.000	25,00	19.833.480	24,79	0,21				1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 unit dari 4 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (induk) berupa Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 166.520,- merupakan sisa pengadaan (efisiensi) pada tw 1 Faktor Pendukung: 1. Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2024 tentang APBD 2025 2. Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 4. DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024 5. SDM yang kompeten 6. Sarana dan Prasarana yang memadai
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	800.865.232.954	15,19	15,64	-0,45	119.016.641.409	14,86	38.114.251.581	4,76	10,10					
2.1	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.091.794.500	7,00	23,58	-16,58	32.038.000	2,93	26.299.463	2,41	0,52					
2.1.1	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	34.456.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 2 dokumen 2. Jumlah Dokumen KUA yang Disusun : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Dokumen KPPAS yang Disusun : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi lintas sektor dengan TAPD dan OPD terkait Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.2	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29.716.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 2 dokumen 2. Jumlah Dokumen Perubahan KUA yang Disusun : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Dokumen Perubahan PPAS yang Disusun : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.3	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	306.766.000	8,00	67,00	-59,00	9.351.000	3,05	9.236.524	3,01	0,04					1. Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi (Indikator SIPD) : 32 dokumen dari 32 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah dilakukan verifikasi dan pengesahan DPA Pergeseran OPD lingkup Pemda DIY setelah sebelumnya dilakukan pencermatan terhadap usulan pengesahan DPA. maupun anggaran kas. Pengesahan/penerbitan DPA Pergeseran diikuti dengan pembuatan dan pencetakan SPD. Untuk tahun 2024 penandatanganan SPD sudah menggunakan tanda tangan elektronik Faktor Penghambat: Aplikasi SIPD RI saat ini selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering terdapat kendala akses. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 114.476,- terdiri dari : sisa angkas sampai dengan bulan Maret pada belanja kertas cover dan merupakan efisiensi pada belanja bahan komputer Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program kegiatan 2. Komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel
2.1.4	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	630.528.500	6,00	6,00	0,00	15.000.000	2,38	12.449.218	1,97	0,41					1. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Indikator SIPD) : dokumen dari 2 dokumen 2. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD : dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terselesaikannya dokumen Perda dan Pergub APBD TA 2025 2. Terdistribusikannya dokumen Perda dan Pergub APBD TA 2025 Faktor Penghambat: Aplikasi SIPD RI saat ini selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering terdapat kendala akses. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 2.846.532,- pada belanja cetak merupakan sisa angkas sampai dengan bulan Maret, dikarenakan realisasi menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program kegiatan 2. Komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel
2.1.5	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	80.703.000	17,00	17,00	0,00	7.687.000	9,53	4.613.721	5,72	3,81					1. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 2 dokumen 2. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Peraturan Daerah tentang P Penjabaran Perubahan APBD : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah menyelesaikan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 115 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025 Faktor Penghambat: Proses cetak, pengandaan dan distribusi dokumen Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 115 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025 menunggu pengesahan Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 11.073.279,- terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp. 2.831.517,- 2. Belanja kertas dan cover Rp. 240.012,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																3. Belanja penggandaan dan cetak Rp. 8.001.750,- Faktor Pendukung: Koordinasi Internal serta koordinasi TAPD dan SKPD berjalan baik
2.1.6	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9.625.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 3 dokumen 2. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah : 0 dokumen dari 1 dokumen 4. Peraturan Gubernur tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PMK dan Permendagri : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	16.823.300	6,38	6,38	0,00	1.068.300	6,35	1.068.300	6,35	0,00					
2.2.1	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 5 laporan 2. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kkota Yogyakarta : 0 laporan dari 1 laporan 3. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Bantul : 0 laporan dari 1 laporan 4. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Kulonprogo : 0 laporan dari 1 laporan 5. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Gunung Kidul : 0 laporan dari 1 laporan 6. Evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Kabupaten Sleman : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2.2	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 5 laporan 2. Evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Perubahan APBD Kota Yogyakarta : 0 laporan dari 1 laporan 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul : 0 laporan dari 1 laporan 4. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kulonprogo : 0 laporan dari 1 laporan 5. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kulonprogo : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman : 0 laporan dari 1 laporan	
2.2.3	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					<p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 5 laporan</p> <p>2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulonprogo : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Kidul : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sleman : 0 laporan dari 1 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
2.2.4	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1.823.300	58,85	58,85	0,00	1.068.300	58,59	1.068.300	58,59	0,00					<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 2 laporan</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Tugas Pembantuan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun berupa Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>BPKA sebagai konsolidator penyusunan laporan tidak memiliki akses ke aplikasi SAKTI</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 450.000,- pada Belanja makan minum rapat,akan di SPJ kan pada bulan berikutnya</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi dengan satker di lingkungan Pemda DIY dapat berjalan dengan baik. permintaan data laporan dipenuhi oleh satker tepat waktu</p>
2.3	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	72.898.000	56,57	63,15	-6,58	39.503.200	54,19	39.065.194	53,59	0,60						
2.3.1	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	15.990.000	45,25	75,25	-30,00	6.600.000	41,28	6.550.500	40,97	0,31					<p>1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan AliranK as, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan coreTax</p> <p>Terlaksananya Bimbingan teknis aplikasi gaji</p> <p>Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Bendahara</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)													(Indikator SIPD) : 1 laporan dari 2 laporan 2. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas : 1 laporan dari 1 laporan 3. Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga : 0 laporan dari 1 laporan	Aplikasi SIPD RI saat ini selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering terdapat kendala akses. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.849.500,- pada belanja makan minum rapat merupakan sisa angkas akan di SPJ kan pada bulan berikutnya Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program kegiatan 2. Komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel
2.3.2	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	56.908.000	59,75	59,75	0,00	32.903.200	57,82	32.514.694	57,14	0,68				1. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Indikator SIPD) : 1100 dokumen dari 8000 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan dan pengeluaran (gaji dan non gaji)I bulan Januari 2025 Terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan keuangan SIPD RI bagi bendahara pengeluaran Terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan keuangan SIPD RI bagi bendahara pennerimaan Faktor Penghambat: Aplikasi SIPD RI saat ini selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering terdapat kendala akses. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 7.117.306,- terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp. 120.006,- efisiensi 2. Belanja kertas dan cover Rp. 105.000,- 3. Belanja kertas dan cover Rp. 88.500,- 4. Belanja makan minum rapat Rp. 75.000,- 5. Belanja SPPD sebesar Rp. 6.728.800,- akan di SPJ kan pada bulan berikutnya Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program kegiatan 2. Komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel
2.4	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	255.912.500	3,77	3,77	0,00	9.473.100	3,70	9.187.760	3,59	0,11					
2.4.1	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	7.972.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 12 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4.2	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17.326.100	46,35	46,35	0,00	7.873.100	45,44	7.587.760	43,79	1,65				1. Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 3 laporan 2. Laporan Keuangan UnAudited 2024 : 1 laporan dari 1 laporan 3. Laporan Keuangan Audited 2024 : 0 laporan dari 1 laporan 4. Laporan Keuangan UnAudited 2025 : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Keuangan UnAudited Pemda DIY TA 2024 sudah diserahkan kepada BPK pada tanggal 17 Februari 2025 Faktor Penghambat: Aplikasi SIPD belum bisa menampilkan saldo awal secara sempurna sehingga perlu dilakukan penyesuaian secara manual pada cetak laporan keuangan Realisasi fisik sesuai target bulan Maret, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 285.340,- terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp. 180.750,- (efisiensi) 2 Belanja bahan cetak Rp. 29.590,- 3. Belanja makan minum rapat Rp. 75.000,- merupakan sisa angkas sampai dengan bulan Maret Faktor Pendukung: Petugas akuntansi di OPD dapat bekerja sama dengan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																baik dan tepat waktu dalam memasukkan data penyusunan laporan keuangan pada aplikasi SIPD
2.4.3	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	50.432.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 2 dokumen 2. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Raperda Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4.4	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.524.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Dokumen Tanggapan/TindakLanjut terhadap LHPBPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4.5	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3.489.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Kerugian Daerah (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4.6	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	52.743.300	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4.7	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	8.974.900	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Indikator SIPD) : 0 orang dari 120 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4.8	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	111.450.000	1,45	1,45	0,00	1.600.000	1,44	1.600.000	1,44	0,00				1. Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Indikator SIPD) : 27 lembaga dari 27 lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 27 BLUD terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD periode Januari-Februari 2025 Faktor Penghambat: sesuai target Faktor Pendukung: Koordinasi Internal serta koordinasi TAPD dan SKPD berjalan baik
2.5	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	799.427.804.654	15,20	15,63	-0,43	118.934.558.809	14,88	38.038.630.864	4,76	10,12					
2.5.1	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	810.143.000	0,99	1,00	-0,01	3.319.000	0,41	3.319.000	0,41	0,00				1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Indikator SIPD) : 0 laporan dari 6 laporan 2. Dokumen RKAT BUKP : 0 laporan dari 1 laporan 3. Dokumen Pengesahan Laporan Tahunan BUKP : 0 laporan dari 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melakukan monitoring dan evaluasi (rapat pembinaan) BUMD triwulan , melakukan pembahasan rencana bisnis BUMD, melakukan pembinaan BUKP melaksanakan rapat koordinasi serta menerbitkan surat menyurat kepada BUMD dan BUKP. proses audit BUKP oleh KAP

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
															<p>laporan</p> <p>4. Dokumen Penetapan Pembagian Laba Bersih BUKP : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>5. Dokumen Seleksi Calon Anggota Direksi 1 BUMD (PDAB 2-3 Direksi) : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>6. Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan BUKP : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>7. Kajian Teknis tentang evaluasi kinerja, kesehatan BUKP dan keberlangsungan usaha BUKP : 0 laporan dari 1 laporan</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <p>Belum terselesaikannya audit laporan keuangan BUMD. Penetapan laba bersih BUKP Menunggu laporan tahunan BUKP ditetapkan terlebih dahulu. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.810.000,- terdiri dari :</p> <p>1. Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 1.410.000,-</p> <p>2. Belanja Honorarium Narasumber Rp. 3.400.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Melaksanakan aktivitas pada subkegiatan berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan</p> <p>Adanya koordinasi internal dan eksternal yang baik.</p>
2.5.2	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	338.278.412.318	35,00	36,00	-1,00	115.931.239.809	34,27	38.035.311.864	11,24	23,03				<p>1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan : 1 laporan dari 5 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Verifikasi berkas pengajuan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan</p> <p>Pengajuan Dana BKK dengan menerbitkan SPP SPM Terselurkannya Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada beberapa kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Reformasi kalurahan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Realisasi fisik berkas pengajuan BKK sesuai target akan tetapi realisasi keuangan menyesuaikan ketersediaan dana dari pusat</p> <p>2. Pencairan terkendala dengan belum disertakannya APBKal sebagai salah satu syarat pencairan. Hal ini disebabkan APBKal belum ditetapkan</p> <p>Selebihnya akan di SPJ kan pada bulan berikutnya</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program kegiatan</p> <p>2. Komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel</p>
2.5.3	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	23.134.539.170	13,50	13,50	0,00	3.000.000.000	12,97	0	0,00	12,97				<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak : laporan dari 1 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya koordinasi internal, dan draf dokumen pendukung pencairan dana darurat</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Anggaran bersifat persediaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program kegiatan</p> <p>2. Komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel</p>
2.5.4	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	437.204.710.166	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				<p>1. Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Propinsi : laporan dari 1 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.477.111.900	13,94	13,80	0,14	423.270.000	12,17	319.299.837	9,18	2,99					
3.1	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.477.111.900	13,94	13,80	0,14	423.270.000	12,17	319.299.837	9,18	2,99					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
3.1.1	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	317.064.000	2,79	2,79	0,00	8.460.000	2,67	6.494.000	2,05	0,62				1. Jumlah Standar Harga yang Disusun (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Pengolahan data hasil survey standar harga oleh pihak ketiga Rapat Koordinasi pembahasan kebijakan SHS Tahun 2026 <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya beberapa barang yang tidak ditemukan penyediannya di pasaran sehingga perlu disubstitusi dengan barang lain yang memiliki spesifikasi yang serupa Perkembangan yang dinamis di dalam peraturan perundangan membutuhkan waktu dalam penyesuaian kebijakan di daerah <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.966.000,- terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja alat tulis kantor Rp. 840.000,- Belanja kertas dan cover Rp. 15.000,- Belanja cetak Rp. 252.000,- Belanja kertas dan cover Rp. 34.000,- Belanja makan minum rapat Rp. 825.000,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerjasama dan komunikasi yang terjalin baik antara OPD dan pihak surveyor sehingga proses olah data berjalan dengan baik dan tepat waktu Kerjasama dan Koordinasi yang selalu dilakukan bersama dengan TAPD membantu dalam merumuskan kebijakan terkait SHS tahun anggaran 2026
3.1.2	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	82.221.600	1,04	1,04	0,00	856.600	1,04	489.000	0,59	0,45				1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Proses pengadaan pengembangan aplikasi RKBMD Menyusun draft SE penyusunan RKBMD 2026 <p>Faktor Penghambat:</p> <p>RKA yang diusulkan masih banyak penyesuaian anggaran, sehingga terkadang terdapat usulan RKBMD yang akhirnya tidak ada dalam RKA atau yang masuk di RKA tetapi tidak diusulkan dalam RKBMD usulan yang baru</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 367.600,- terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja alat tulis kantor Rp. 1.600,- Belanja kertas dan cover Rp. 6.000,- Belanja makan minum rapat Rp. 360.000,- belum di belanjakan <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Komunikasi yang terjalin baik dengan rekanan pengembang Aplikasi RKBMD sehingga dinamika penyusunan RKBMD dapat direspon dengan cepat</p>
3.1.3	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	239.897.000	9,95	9,95	0,00	23.620.000	9,85	21.401.850	8,92	0,93				1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Proses pengadaan pengembangan aplikasi Aset tetap dan persediaan Menyusun draft SE penyusunan Laporan BMD 2025 Melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan operasionalisasi Aplikasi Aset dan Aplikasi Persediaan dan rekonsiliasi laporan BMD melalui rapat bersama dengan OPD Bimtek pengelolaan barang milik daerah Tahun 2025 telah dilaksanakan <p>Proses pengentryan aplikasi Aset Tetap dan persediaan tahun 2025 dan Inventarisasi BMD menunggu koreksi BPK (LHP BPK RI 2024)</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 218.150,-</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Komunikasi yang terjalin baik dengan rekanan pengembang Aplikasi RKBMD sehingga dinamika penyusunan Laporan BMD dapat direspon dengan cepat</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
3.1.4	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.153.066.800	8,25	8,25	0,00	117.824.100	5,47	89.180.787	4,14	1,33				1. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 1 Laporan dari 2 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan pengamanan barang milik daerah telah mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2025, berupa pengamanan fisik di 5 BMD idle Pemda DIY, pembayaran listrik dan proses pensertifikatan tanah.</p> <p>Faktor Penghambat: Dokumen pendukung yang dibutuhkan kadang tidak tersedia dengan memadai Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 31.043.313,- terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja cetak Rp. 1.969.100,- merupakan sisa angkas s.d maret, realisasi menyesuaikan kebutuhan 2. Belanja bahan komputer sebesar Rp. 7.890.000,- belum dilaksanakan 3. Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 2.175.000,- sisa angkas s,d bulan Maret 4. Belanja tagihan listrik Rp. 13.179.213,- realisasi menyesuaikan tagihan, angkas merupakan persediaan 5. Belanja registrasi Rp. 3.400.000,- 6. Belanja SPPD Rp. 2.400.000,- dalam proses SPJ <p>Faktor Pendukung: Komunikasi yang telah terbangun dengan baik antara Pemda DIY dengan Kantor Pertanahan maupun pemangku kepentingan yang lain membantu terlaksananya pelaksanaan pengamanan BMD di Triwulan 1 2025 ini.</p>
3.1.5	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	205.879.500	26,59	26,59	0,00	54.529.500	26,49	53.288.900	25,88	0,61				1. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 1 Laporan dari 3 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: TPenilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemanfaatan dilaksanakan dengan pihak ketiga (KJPP). Saat ini memasuki proses penilaian, hasil penilaian dijadwalkan tersedia pada 18 Maret 2025</p> <p>Faktor Penghambat: Belum siapnya administrasi perpajakan (CORE TAX) menghambat proses pengadaan barang dan jasa Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.640.600,- terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja makan minum rapat Rp. 450.000,- 2. Belanja js konsultasi bidang keuangan Rp. 782.600,- merupakan efisiensi 3. Belanja SPPD Rp. 400.000,- belum di belanjakan <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan OPD di lingkungan Pemda DIY membuat proses perencanaan dan pelaksanaan penilaian berjalan dengan baik</p>
3.1.6	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	478.983.000	45,68	44,68	1,00	217.979.800	45,51	148.445.300	30,99	14,52				1. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Indikator SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa pemindahtanganan : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Dokumen Pemusnahan BMD : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Jumlah h Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi pembahasan rencana pemindahtanganan BMD 2. Terlaksananya penjualan BMD di triwulan I 2025 (per tanggal 12 maret 2025), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjualan Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jaringan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia b. Penjualan sisa bongkaran material bangunan serta jaringan di lingkungan Pemda DIY c. Penjualan Peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya d. Penjualan Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan pada Segmen Garongan - Congot <p>Faktor Penghambat: Lokasi BDM yang cukup jauh menyebabkan calon peserta penjualan kurang berminat untuk melakukan penawaran karena dibutuhkan biaya operasional yang besar dalam pengambilan BMD tersebut Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 17.284.500,- terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja kertas dan cover sebesar Rp. 15.000,- merupakan efisiensi 2. Belanja makan minum rapat Rp. 2.055.000,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Penghapusan BMD : 0 dokumen dari 1 dokumen	merupakan sisa angkas s.d. maret 3. Belanja sewa angkutan Rp. 16.100.000,- merupakan sisa pengadaan 4. Belanja pemeliharaan gedung Rp. 216.500,- merupakan efisiensi 5. Belanja SPPD Rp. 3.000.000,- dalam proses SPJ Faktor Pendukung: 1. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara OPD dan tim pemindahtanganan dan penghapusan sehingga proses pemindahtanganan bisa berjalan dengan lancar 2. Jumlah usulan pemindahtanganan dan penghapusan BMD dari OPD maupun SMA/SMK relatif banyak sehingga bisa dilakukan penjualan di TW I 2025 ini.
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.953.433.500	4,35	4,45	-0,10	124.135.000	4,20	108.516.300	3,67	0,53						
4.1	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.953.433.500	4,35	4,45	-0,10	124.135.000	4,20	108.516.300	3,67	0,53						
4.1.1	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2.716.454.400	2,60	2,60	0,00	67.965.000	2,50	54.081.300	1,99	0,51					1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Indikator SIPD) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. DPA Pendapatan Tahun Anggaran 2026 : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. DPA Pendapatan Tahun Anggaran 2025 Perubahan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pelayanan pembayaran PKB di Samsat Corner Galeria Mall setiap hari oleh BPKA Induk, Samsat Kota Yogyakarta, BPD DIY, Polisi, dan Jasa Raharja 2. Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penyaluran Opsen Pajak bersama Pemerintah Kab/Kota 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Samsat DIY Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 17.883.700,- terdiri dari : 1. Belanja alat tulis kantor Rp. 194.500,- merupakan sisa angkas s.d. maret 2. Belanja cetak Rp. 2.000.000,- dalam proses SPJ 3. Belanja bahan komputer Rp. 639.200,- 4. Belanja makan minum rapat Rp. 75.000,- 5. Belanja mamin aktifitas lapangan Rp. 5.355.000,- 6. Belanja Honor Tim Rp. 1.500.000,- 7. Belanja jasa layanan umum Rp. 6.120.000,- 8. Belanja SPPD Rp. 2.000.000,- dalam proses SPJ Faktor Pendukung: 1. Adanya pemberian Cashback 50% max 50rb untuk pembayaran PKB bagi pengguna BPD DIY Mobile dan Cashback 50% max 20rb bagi pengguna QRIS selama 1 Maret s.d. 31 Maret 2025, sehingga cukup banyak wajib pajak yang membayar PKB. 2. Terlaksananya koordinasi internal yang baik antara BPKA Induk dengan Samsat DIY dalam upaya untuk pengoptimalan PAD.
4.1.2	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	19.867.100	31,41	31,41	0,00	5.940.000	29,90	5.560.000	27,99	1,91					1. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Indikator SIPD) : 0 Laporan dari 5 Laporan 2. Laporan Dana Keistimewaan : 0 laporan dari 1 laporan 3. Laporan DID : 0 laporan dari 1 laporan 4. Laporan DAK Fisik : 1 laporan dari 1 laporan 5. Laporan DAK Non Fisik : 0 laporan dari 1 laporan 6. Laporan DBH : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan OPD Pengguna Dana Transfer untuk persiapan penyaluran dana transfer TA 2025 2. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik TA 2025 pada hari Kamis, 20 Februari 2025, dengan narasumber DJPK dan KPPN DIY yang dihadiri oleh OPD Pengguna DAK Fisik di Pemda DIY dan Pemkab/kota Faktor Penghambat: 1. Adanya OPD Pengguna Dana Transfer yang baru pertama kali menerima dana transfer di TA 2025, sehingga perlu perhatian lebih dan bimbingan secara langsung agar tidak terjadi hambatan dalam penyaluran dana transfer. 2. Adanya INPRES yang menginstruksikan untuk mengurangi belanja perjadiin 50% sehingga tidak bisa mendatangkan narasumber pusat (DJPK) secara langsung. DJPK hadir secara daring dalam Sosialisasi Kebijakan dan Penyaluran DAK Fisik TA 2025.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>3. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 5.306.000,- terdiri dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 1.280.000,- di TW I dirasionalisasi sebesar Rp600.000. dan sisanya sebesar Rp. 680.000,- akan di SPJ kan bulan berikutnya, pada Belanja Perjadin Narsum Sosialisasi DAK Fisik dirasionalisasi sebesar Rp4.026.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Koordinasi dengan OPD Pengguna Dana Transfer berjalan dengan lancar, baik secara luring (rapat koordinasi) maupun daring (zoom meeting/by phone) dalam persiapan penyaluran dana transfer.</p> <p>2. Komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik antara BPKA DIY dengan Pemerintah Pusat (DJPK dan KPPN DIY) sehingga pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Penyaluran DAK Fisik TA 2025 bisa berjalan dengan lancar</p>
4.1.3	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	157.402.000	24,68	24,68	0,00	38.850.000	24,68	38.850.000	24,68	0,00				<p>1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Indikator SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terlaksananya Sosialisasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 (anggaran sebesar Rp3.570.000) bagi Bendahara di Instansi Vertikal DIY pada hari Kamis, 13 Maret 2025, dengan narasumber oleh Kanwil DJP DIY</p> <p>2. Akan dilaksanakan Siaran Langsung Radio 2 kali (anggaran sebesar Rp7.000.000) dengan narasumber dari Kanwil DJP DIY pada bulan Maret, yaitu pada tanggal 18 dan 20 Maret 2025</p> <p>3. Akan dilaksanakan Program Televisi Talkshow (anggaran sebesar Rp13.000.000) dengan narasumber dari Kanwil DJP DIY bersama Kepala Bidang Anggaran Pendapatan pada tanggal 19 Maret 2025</p> <p>4. Terlaksananya Publikasi Cetak Baliho (anggaran sebesar Rp8.170.000) terkait Lapor SPT Pajak di 2 lokasi (perempatan Jl Monjali dan Jl Parangtritis)</p> <p>5. Publikasi Surat Kabar (anggaran sebesar Rp7.110.000) terkait Lapor SPT akan dilaksanakan pada 17 Maret 2025</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Kegiatan Publikasi Perpajakan Pusat, seperti surat kabar, baliho, sosialisasi PPh, siaran langsung radio, program televisi talkshow, perlu koordinasi secara langsung dengan pimpinan Kanwil DJP DIY, namun dengan adanya INPRES yang menginstruksikan untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/FGD, maka koordinasi ke Kanwil DJP DIY baru bisa dilaksanakan pada akhir Februari setelah sudah ada kepastian besaran belanja yang akan dirasionalisasi. Sehingga jadwal pelaksanaan publikasi perpajakan pusat agak mundur dari perencanaan awal.</p> <p>2. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 17.330.000,- pada Belanja Publikasi untuk Bahan Cetak Spanduk dirasionalisasi 100% sebesar Rp12.312.000 (TW 1 sebesar Rp3.780.000), dan honor narasumber Kanwil DJP DIY juga dirasionalisasi 100% (pada TW I sebesar Rp6.450.000) karena Kanwil DJP DIY tidak diperbolehkan lagi untuk menerima honor, Belanja Perjadin Uang Transport Peserta dirasionalisasi sebesar Rp3.600.000 karena peserta merupakan ASN</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Hubungan kerjasama dengan Kanwil DJP DIY berjalan dengan baik sehingga dalam pelaksanaan publikasi perpajakan pusat bisa terstruktur dengan baik</p>
4.1.4	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.710.000	34,50	43,50	-9,00	10.180.000	31,12	8.900.000	27,21	3,91				<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Indikator SIPD) : 3 Laporan dari 12 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Penerimaan SIPD di Komplek Kepatihan Unit VIII, Danurejan, Yogyakarta pada hari Kamis, 27 Februari 2025, yang dihadiri oleh bendahara penerimaan di lingkup OPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan narasumber dari Kementerian</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Dalam Negeri.</p> <p>2. Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Pendapatan Daerah dengan OPD Berpendapatan setiap bulan.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri turut memberikan sambutan dalam Bimtek Penatausahaan Penerimaan SIPD secara daring sehingga ada sedikit kendala dalam koneksi jaringan</p> <p>2. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 7.970.000,- terdiri dari : 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 7.770.000,- dengan keterangan Rp4.590.000 dari Februari digeser ke April dan Rp. 3.180.000,- akan di SPJ kan pada bulan berikutnya</p> <p>2. Belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp. 200.000,- merupakan sisa belanja/efisiensi dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah dari 12 kali menjadi 2 kali (Januari dan Februari), sehingga Rapat Rekonsiliasi Pendapatan Daerah dari bulan maret hingga desember akan dilaksanakan secara daring (zoom meeting)</p> <p>3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan SKPD Berpendapatan dari 24 kali menjadi 12 kali, sehingga untuk rapat intensif dengan OPD Berpendapatan dilaksanakan secara daring (zoom meeting) bila perlu tambahan rapat</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri berjalan dengan baik, narasumber pemateri dalam bimtek hadir secara langsung sehingga memudahkan peserta dalam memahami materi</p>
4.1.5	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	27.000.000	5,00	5,00	0,00	1.200.000	4,44	1.125.000	4,17	0,27					<p>1. Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Indikator SIPD) : 0 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester 1 : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>3. Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester 2 : 0 laporan dari 1 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terlaksananya Komunitas Belajar (Corporate University) tentang Bimbingan Teknis Penghitungan Opsen PKB pada hari Kamis, 13 Februari 2025 yang dihadiri oleh petugas pelayanan pembayaran PKB di Samsat Corner Galeria Mall (BPKA Induk), dengan pengajar oleh Kepala Bidang Anggaran Pendapatan dan Kepala Subbidang Pajak Daerah</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Realisasi sesuai target, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 575.150,- terdiri dari : Belanja bahan cetak penggandaan sebesar 500.150,- dirasionalisasi 100% dan sisa angkas belanja makan minum rapat sebesar Rp. 75.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Peserta ikut berperan aktif dalam komunitas belajar sehingga adanya komunikasi timbal balik antara pengajar dan peserta</p>
Jumlah			886.124.524.586	15,68	16,08		134.362.418.511	15,16	46.393.310.043	5,24							